

SUMMARY

The nomination of women in politics lately being widely eyes ranging from elite politicians to non-elite community, given the Court's decision in the election law no.10 of 2008, related to affirmative action on 30% quota for women's representation. In its application, the elections in the regions many proof-texted found women who registered with the Election Commission as candidates of the party in order to abort the requirements of the party in the following elections. This means that a political party is not doing a good recruitment for women cadres were deliberately prepared before registered as female candidates. Taking women candidates without going through the selection and recruitment of good politics certainly like to include women in the ravine.

In the context of Sumenep, in the 2009-2014 period there were three women legislators of the 50 people the number of available seats in the legislature Sumenep. Of the three, only two people who had the opportunity to go forward and declared the incumbent female candidates in legislative elections in 2014 that Dwita Andriani and Sri Endang Rahayu. As for which of them is Rachema not go forward because the party base did not pass the requirements of the election of 2014. Both Dwita and Endang as women candidates and classified incumbent elites in Sumenep in maintaining his power certainly have an attempt to gain support from voters, which is becoming efforts materials research conducted by researchers in this paper by using the method in dept interview qualitatively.

Social Events Sumenep which consists of public land and island communities, it has become one of the uniqueness in it when compared to some other districts in East Java. This geographical factor of influence in some aspects, social aspects, aspects of culture, education, economy, development and progress of society mindset. Inequality between the mainland and island communities certainly very pronounced, where the public land following the development of advanced middle age while the island communities are far behind, so is the service factor, island communities much more difficult to obtain government services than citizens of the mainland.

Discusses the elite and non-elite groups in society Sumenep, one of which became the elite in society are the class of clerics, they became elite in many sectors. Among others in the public sector, can be characterized by several times Sumenep led by the Regent of the clerics, starting from the 1998 reform rolled out. The role of clerics able to distribute faction in filling key posts in the government, so the saving researchers concluded that the political arrangement in Sumenep based on the rule of clerics. Whereas in its history, Sumenep kingdom is an area in which the leader is a king or a descendant of King Wiraraja whose influence contributed greatly to the development of this country. The history shifted and replaced by the role of clerics. And the position of the palace is in Sumenep just a museum of history, no longer runs its function as areas other palace which still survive today. Similarly, respect for Sumenep community against blue blood group is not as great respect for the clerics, the comparison so far. The strong patriarchal culture and the influence of schools in Sumenep would be difficult for women candidates won seats in the legislature.

Research using the analysis based on the theory and the theory of this power elite concluded that in order to maintain the position of women in the context of Sumenep incumbent candidates, there were three attempts namely; first, they must be completed by clerics, meaning that they come from influential clerics in Sumenep relatives or non-relatives clerics but based on recommendations from clerics; second, they came from the family of the political elite or special; Third, they have social capital, political capital and financial capital synergistic. In addition it also should be interesting and educational performance of a woman should be high. In contrast to male candidates, education and performance is not significant. So the work of women in politics is competing two times more tired than men. Challenges and barriers experienced by women candidates in the 2014 Legislative Election, namely; *first*, the strong patriarchal culture in the boarding area, be difficult for women candidates to be accepted in the middle of the community in gaining political support; *second*, an open electoral system in Legislative Election 2014 makes the high cost of political campaigns; *third*, cannibalism occurs between candidates in one party; and *fourth*, the practice of money politics that is difficult to resist.

RINGKASAN

Kandidasi perempuan dalam politik akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak mata mulai dari elit politisi hingga masyarakat non elit, mengingat keputusan MK dalam undang-undang pemilu No.10 tahun 2008, terkait *affirmative action* tentang kuota 30% untuk keterwakilan perempuan. Dalam penerapannya, pada pemilu di daerah-daerah banyak ditemukan asal comot perempuan yang didaftarkan ke KPU sebagai caleg dari partainya demi menggugurkan persyaratan partai dalam mengikuti pemilu. Artinya partai tidak melakukan rekrutmen politik yang baik bagi kader-kader perempuan yang sengaja disiapkan sebelum didaftarkan sebagai perempuan caleg. Mengambil perempuan caleg tanpa melalui seleksi dan rekrutmen politik yang baik tentu ibarat memasukkan perempuan dalam jurang.

Dalam konteks Sumenep, pada periode 2009-2014 terdapat tiga orang perempuan anggota legislatif dari 50 orang jumlah kursi yang tersedia dalam lembaga legislatif Kabupaten Sumenep. Dari ketiganya, hanya terdapat dua orang yang berkesempatan maju dan dinyatakan sebagai perempuan caleg petahana pada Pileg 2014 yaitu Dwita Andriani dan Endang Sri Rahayu. Sementara untuk yang satunya yaitu Rachema tidak maju lagi dikarenakan basis partainya tidak lolos dalam persyaratan pemilu 2014. Baik Dwita maupun Endang selaku perempuan caleg petahana dan tergolong kaum elit di Sumenep dalam mempertahankan kekuasaannya tentu memiliki upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari pemilih, yang mana upaya-upaya tersebut menjadi bahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tulisan ini dengan menggunakan metode *in dept interview* secara kualitatif.

Kondisi sosial Sumenep yang terdiri dari masyarakat daratan dan masyarakat kepulauan, hal tersebut menjadi salah satu keunikan di dalamnya ketika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Faktor geografis ini tentu mempengaruhi dalam beberapa aspek, baik aspek sosial, aspek budaya, pendidikan, ekonomi, pembangunan dan kemajuan pola pikir masyarakatnya. Ketimpangan antara masyarakat daratan dan kepulauan tentu sangat terasa, di mana masyarakat daratan tengah maju mengikuti perkembangan jaman sementara masyarakat kepulauan jauh tertinggal, begitu pula dalam faktor pelayanan, masyarakat kepulauan jauh lebih sulit dalam memperoleh pelayanan pemerintah dibandingkan warga daratan.

Membahas tentang kelompok elit dan non elit dalam masyarakat Sumenep, salah satu yang menjadi golongan elit dalam tatanan masyarakat ini adalah golongan kyai, mereka menjadi golongan elit di banyak sektor. Di antaranya dalam sektor pemerintahan, dapat ditandai dengan beberapa kali Kabupaten Sumenep dipimpin oleh Bupati dari kalangan kyai, terhitung sejak reformasi 1998 digulirkan. Peran kyai mampu mendistribusikan golongannya dalam mengisi pos-pos penting dalam pemerintahan, jadi dalam hemat peneliti menyimpulkan bahwa penataan politik di Kabupaten Sumenep berdasarkan kedaulatan kyai. Padahal dalam sejarahnya, Sumenep adalah daerah kerajaan yang mana pemimpinnnya adalah seorang raja atau keturunan Raja Wiraraja yang pengaruhnya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan negeri ini. Sejarah tersebut mengalami

pergeseran dan tergantikan oleh peran seorang kyai. Dan posisi keraton yang ada di Sumenep hanya menjadi museum sejarah, tidak lagi berjalan fungsinya sebagaimana daerah-daerah keraton lain yang masih bertahan hingga saat ini. Begitu pula penghormatan masyarakat Sumenep terhadap golongan darah biru tidak sebesar penghormatan terhadap kyai, perbandingannya sangat jauh. Kuatnya kultur patriarki dan pengaruh pesantren di Sumenep tentu menjadi kesulitan bagi perempuan caleg dalam memperoleh kursi legislatif.

Penelitian dengan menggunakan analisa berdasarkan teori elit dan teori kekuasaan ini menyimpulkan bahwa untuk mempertahankan posisi bagi perempuan caleg petahana dalam konteks Sumenep, ada tiga upaya yaitu; *pertama*, mereka harus sudah selesai dengan kyai, artinya mereka berasal dari kerabat kyai berpengaruh di Sumenep atau bukan kerabat kyai tetapi berdasarkan rekomendasi dari kyai; *kedua*, mereka datang dari keluarga elit politik atau istimewa; *ketiga*, mereka memiliki modal sosial, modal politik dan modal finansial yang sinergis. Di samping itu juga performa harus menarik dan pendidikan seorang perempuan harus tinggi. Berbeda dengan caleg laki-laki, pendidikan dan performa bukan hal yang signifikan. Jadi kerja perempuan dalam berkontestasi politik dua kali lipat lebih capek daripada laki-laki. Tantangan dan hambatan yang dialami oleh perempuan caleg pada Pileg 2014 yaitu; *pertama*, kuatnya kultur patriarki di daerah pesantren, menjadi kesulitan bagi perempuan caleg untuk diterima di tengah-tengah masyarakat dalam memperoleh dukungan politik; *kedua*, sistem pemilu terbuka pada Pileg 2014 menjadikan mahal biaya kampanye politik, *ketiga*, terjadi kanibalisme antar caleg dalam satu partai, dan *keempat*, praktik *money politic* yang susah dibendung.